

Implementasi Program PBL (Pembangunan Berbasis Lingkungan) Mapaluse di Kota Manado.

Toar Willem Canalini Ransun

Bimbingan : 1. Prof. Dr. Drs. P. Rumapea, M.Si
2. Dr. Dra. Joyce Rares, M.Si)

ABSTRACT : *PBL Mapaluse is one of the flagship programs of the Mayor of Manado. Implementation PBL Mapaluse in Manado City was run according to regulations, but there are still problems that occur. The theory is used to analyze the data using the Van Meter and Van Hornis standards and objectives of the policy / measure and policy objectives, resources, the characteristics of the implementing organization, communication between relevant organizations and implementation activities, disposition or attitude of the implementers, social, economic and political. Data sources originate from as many as 14 people. The conclusion that can be drawn from the results of this study is that in general the implementation of a PBL Mapaluse program in the city of Manado already well although there are some obstacles that occur both internally and externally. Recommendations and suggestions to the government pay more attention to the speed of the disbursement, So there is no longer delay in the disbursement of funds in each environment.*

KEY WORD : *Implementatation of PBL Mapaluse*

PENDAHULUAN

Dewasa ini kehidupan bermasyarakat sangat diharapkan apalagi didalam suatu lingkungan penduduk di Indonesia. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat diberikan tugas yang cukup berat untuk memberikan pelayanan kesejahteraan, menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan nilai-nilai sosial didalam masyarakat. Seperti yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menyebutkan : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dengan adanya landasan yang sangat jelas ini maka pemerintah sebagai pelaksana mempunyai andil besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Didalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, bertujuan untuk membantu kebutuhan setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan yang didasari ketidakmampuan daerah masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan setiap

warga masyarakatnya baik segi fisik maupun non fisik yang ditenggarai oleh masalah ekonomi yang berbeda-beda.

Dalam mendukung pelaksanaan kesejahteraan sosial di daerah-daerah maka pemerintah menurunkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini memperjelas akan bantuan dari pemerintah yang memberikan seluas-luasnya kepada daerah otonomi untuk lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan didalam masyarakat di daerah masing-masing.

Di provinsi maupun kota-kota di Indonesia mulai menggalakkan atau melahirkan program-program yang pro terhadap rakyat, tak terkecuali kota Manado yang merupakan tujuan penelitian ini. Sejak terpilihnya Walikota yang baru tahun 2010 program-program untuk mensejahterahkan rakyat mulai ditampilkan, diantaranya yang terpopuler adalah 8 program Walikota yang sedang berjalan, antara lain : 1) PBL Mapaluse; 2) upah kepala lingkungan menjadi Rp 2 juta/bulan; 3) pelayanan kesehatan melalui program Universal Coverage dan pelayanan di Puskesmas 1 x 24 jam; 4) peningkatan honor petugas kebersihan menjadi Rp 2 juta/bulan; 5)

penyediaan seragam dan perlengkapannya bagi siswa yang kurang mampu; 6) peningkatan upah aparat kelurahan non PNS menjadi Rp 2 juta/bulan; 7) peningkatan insentif rohaniawan dari Rp 500 ribu/tahun menjadi Rp 500 ribu tiap bulan; dan yang belum terealisasi sepenuhnya adalah program kedelapan yaitu peningkatan tunjangan tambahan penghasilan PNS hingga 100 %, yang secara bertahap telah dinaikkan. (Dinas Kominfo Kota Manado).

Untuk memperkuat program-program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015, yang didalamnya mengatur tentang program-program jangka menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Manado.

Program kesejahteraan yang ingin diangkat salah satunya ialah Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial Ekonomi yang disingkat (PBL-MAPALUSE) dan juga merupakan salah satu program andalan dari Walikota Manado. Hal tersebut di tegaskan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) yang merupakan badan yang di tunjuk menangani program ini bahwa Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial Ekonomi (PBL MAPALUSE) yang diberikan kepada 504 lingkungan di 87 kelurahan dan 9 kecamatan se-Kota Manado yang di tata dalam APBD tahun 2012 dengan dana stimulan Rp 75.000.000 di tiap lingkungan dinilai baik oleh masyarakat dan sangat pro rakyat. PBL Mapaluse bukan merupakan proyek, tapi merupakan program yang dikelola langsung oleh masyarakat dan dananya langsung ke rekening Kelompok Masyarakat Mapaluse (KMM), yang diketuai oleh kepala lingkungan (Humas Pemkot Manado).

Disampaikan langsung oleh Wakil Walikota manado pada wartawan beritamanado.com, PBL MAPALUSE, atau singkatan dari Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana LingKungan, Sosial, dan Ekonomi merupakan suatu terobosan baru dari Pemerintah Kota Manado dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Walikota Manado, menegaskan bahwa PBL Mapaluse merupakan program unggulan Pemerintah Kota Manado untuk menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara ‘Mapalus’ di setiap lingkungan dalam wilayah kelurahan. Program ini merupakan suatu terobosan baru dari Pemerintah Kota Manado dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Program mulia ini yang digagas pimpinan sangat-sangat di dukung oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dengan adanya program Pembangunan Berbasis Lingkungan ini kami optimis kesejahteraan kelurahan dan lingkungan akan meningkat. Agar teknis pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana program maka perlu di adakan sosialisasi langsung ke setiap kelurahan-kelurahan yang ada di kota Manado.

Namun dalam pelaksanaannya program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial Ekonomi (PBL–

MAPALUSE) di Kota Manado yang telah dimulai sejak tahun 2012 ini akan terjadi banyak permasalahan diantaranya, sumber daya yang masih minim disebabkan tidak semua kepala lingkungan memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas ataupun sarjana dan terlebih tidak menguasai IT, kurangnya tenaga teknis atau ahli di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan dalam penyaluran dana langsung kepada kepala-kepala lingkungan, masih terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana dan faktor cuaca di kota manado yang kurang menentu di dalam pembangunan fisik seperti pembuatan selokan dan talud yang membutuhkan cuaca yang bagus. Otomatis berbagai kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial Ekonomi (PBL-MAPALUSE) di Kota Manado telah berjalan baik atau belum.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam, yang

kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu teori implementasi atau dengan menggunakan metode deduktif yang mengangkat permasalahan internal dan external.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Malalayang (Rayon Manado Selatan), Kecamatan Tuminting (Rayon Manado Utara) dan Kecamatan Paal Dua (Rayon Manado Utara) berhubung 3 (tiga) Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah populasi penduduk yang banyak dan padat penduduk dari 8 (delapan) Kecamatan yang lain yang ada di Kota Manado.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan.

Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah pegawai di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Manado sebanyak 2 (dua) orang, Kepala Kecamatan 3 (tiga) orang (Kec. Tuminting, Kec. Paaldua dan Kec. Malalayang), Kepala Kelurahan 3 (tiga) orang (Kel. Bahu, Kel. Malendeng dan Kel. Tuminting) mengapa penulis mengambil 3 (tiga) kelurahan tersebut, karena hasil pra survei yang telah dilakukan di beberapa kelurahan yang ada, 3 (tiga) kelurahan ini yang memiliki respon baik dalam memberikan informasi sehingga penulis mendapatkan data yang transparan, Kepala Lingkungan 3 (tiga) orang (1 kepala lingkungan dari kecamatan malalayang, 1 kepala lingkungan dari kecamatan paal dua dan 1 dari kecamatan tuminting), dan Masyarakat di 3 (tiga) Kecamatan tempat dilaksanakan program PBL tersebut sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai di BPMPK : 2 orang
2. Camat: 3 orang
3. Lurah 3 orang
4. Kepala Lingkungan : 3 orang
5. Masyarakat : 3 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*). Dalam melakukan wawancara, dibuat pedoman yang dijadikan acuan dan instrumen wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, terstruktur dengan pedoman.
2. Dokumentasi. Mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif.
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara Langsung Peristiwa/Fenomena Yang Diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Aktivitas analisis data Miles and Huberman (1984) terdiri atas : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*reduction*), langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap, yang *pertama*, melibatkan langkah-langkah

editing, pengelompokan dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*), Komponen *kedua* analisis interaktif dari Miles dan Huberman yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam 1 kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa

bertumpuk maka penyajian data (*data display*) pada umumnya diyakini sangat membantu dalam proses analisis. Dalam hubungan ini data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat disini bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala 1 dengan yang lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowhart* dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat

dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa program PBL Mapaluse (Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial Ekonomi) yang ada di kota Manado sudah dijalankan sesuai dengan prosedurnya dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah dalam hal ini BPMPK (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan) Kota Manado, Pemerintah

Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Kepala Lingkungan dan masyarakat setempat. Ini mempunyai makna bahwa implementasi program PBL Mapaluse di kota Manado pada umumnya telah terlaksana dengan baik karena mengingat PBL Mapaluse merupakan salah satu dari sembilan program unggulan yang diprogram oleh Walikota sebagai bentuk upaya pembangunan pemerintah yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam membangun lingkungan serta meningkatkan rasa gotong royong dan swadaya dari masyarakat itu sendiri serta memberikan kenyamanan dan kemudahan di lingkungan dimana masyarakat itu tinggal.

PBL Mapaluse sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Namun terkadang timbul tanggapan yang negatif sehubungan dengan pelaksanaan program PBL Mapaluse ini, sehingga untuk mengatasinya diperlukan komunikasi yang baik antara pihak BPMPK selaku pelaksana dan Pemerintah kecamatan maupun kelurahan untuk mensosialisasikan sebaik-baiknya kepada kepala lingkungan dalam hal ini KMM (Kelompok Masyarakat Mapalus) yang diketuai langsung oleh

Kepala Lingkungan dan beranggotakan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan lingkungan yang dimaksud dalam program PBL Mapaluse bersifat berkesinambungan, hal ini bertujuan untuk merangsang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya, tidak hanya berpusat terhadap dana yang didapatkan dari program ini melainkan bersumber juga dari swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, materi, alat-alat pembangunan, maupun konsumsi. Dengan cara seperti ini, pemerintah mengharapkan kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program yang menjadi unggulan Kota Manado.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengambilan data yang dilakukan, ditemukan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program PBL Mapaluse yang membuat program ini tidak berjalan sesuai perencanaan di masing-masing lingkungan. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan program PBL Mapaluse antara lain :

- Pencairan dana ke setiap lingkungan-lingkungan terhambat dikarenakan keterlambatan penyaluran yang harus menunggu adanya APBD perubahan 2013 dari Permendagri Nomor 32 tahun

2011 ke Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Waktu yang tersedia untuk penyaluran dana hanya 3 bulan (oktober,november,desember) pada tahun 2013. Dalam waktu 3 bulan harus melakukan 3 kali penyaluran dana masing-masing 40% untuk tahap I, 30% untuk tahap II dan 30% untuk III. Hal ini berjalan tidak sebanding dengan jalannya pembangunan karena tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu dari 504 lingkungan, hanya ada 3 lingkungan yang berhasil dicairkan dananya sampai pada tahap ke II, dan tidak ada yang berhasil dicairkan dananya sampai pada tahap ke III.
- Sumber daya yang masih minim disebabkan tidak semua kepala lingkungan memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas ataupun sarjana dan terlebih tidak menguasai IT, sehingga dalam pembuatan proposal pengajuan dana kegiatan pembangunan mengalami hambatan. Hal yang cukup rumit ini menjadi faktor keterlambatan

pencairan dana untuk memulai pembangunan. Kemudian disamping proposal pengajuan, pada tahap akhir kegiatan para kepala lingkungan harus membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan yang dilakukan sehingga terjadi keluhan dari sebagian besar kepala lingkungan yang kurnag mengerti bagaimana cara pembuatannya.

- Faktor cuaca di kota manado yang kurang menentu di dalam pembangunan fisik terlebih di awal tahun 2014 terjadi bencana alam yang mengakibatkan beberapa infrastruktur yang sudah dibangun di beberapa kelurahan di Kota Manado mengalami kerusakan, sehingga memerlukan pembangunan kembali. Untuk melakukan pembangunan kembali, harus dibuat berita acara kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang harus dimasukkan ke pihak BPMPK.
- Minimnya tenaga teknis dari pihak BPMPK yang harus menangani lingkungan, dimana 1 (satu) tenaga teknis harus memonitoring 12 (dua belas) lingkungan. Hal itu sangat tidak efektif dalam hal waktu dan tenaga. Sehingga dalam pelaksanaan

monitoring tidak sesuai yang diharapkan.

Penerapan program PBL Mapaluse yang ada di Kota Manado sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain itu, masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Karena dengan program ini, infrasturktur yang dulunya rusak atau tidak ada, sekarang sudah diperbaiki dan diadakan. Contohnya pembuatan jalan setapak, selokan, saluran air, lampu jalan, pengadaan kursi-kursi untuk kepentingan kemasyarakatan, dan lain-lain.

Upaya yang pernah dilakukan Pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi, antara lain :

- Menambah tenaga teknis yang diturunkan langsung ke setiap lingkungan sebagai pihak yang memonitoring berjalannya kegiatan.
- Menambah tenaga fasilitator untuk mendampingi setiap kepala lingkungan atau KMM dalam pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan.
- Mengusahakan kecepatan pencairan dana di tahun-tahun selanjutnya.
- Mengkomunikasikan verifikasi program dengan beberapa instansi diantaranya Dinas PU, Bappeda, Dinas Sosial,

Badan Keuangan, dan beberapa instansi terkait lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar, sasaran dan tujuan kebijakan
Kebijakan Implementasi program PBL Mapaluse sangat berperan dalam mendukung pencapaian pembangunan di Kota Manado, terlebih khusus pelaksanaannya di lingkungan-lingkungan yang tidak bisa dijangkau langsung oleh Pemerintah Daerah.
2. Sumber daya
Dengan adanya program PBL Mapaluse ini menambah kesadaran masyarakat dan kepeduliannya terhadap lingkungan sehingga partisipasi masyarakat tersalur dalam bentuk swadaya yang diberikan sesuai dengan kemampuan dalam hal pemberian tenaga, materi, pendapat, konsumsi tambahan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana & komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Program PBL Mapaluse ini bisa dijalankan dengan baik karena adanya komunikasi yang terjalin antara Pemerintah dalam hal ini BPMPK

(Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan) Kota Manado, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Kepala Lingkungan dan masyarakat setempat.

4. Disposisi atau sikap para pelaksana
Sikap para pelaksana dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan sebagai pelaksana program sangat baik dalam penyaluran dana ke lingkungan-lingkungan di setiap kelurahan, sosialisasi sampai kepada tahap pelaporan, begitu juga pemerintah kecamatan dan kelurahan yang sangat terbuka dan antusias dalam penyelenggaraan program ini.
5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Dalam lingkungan sosial ekonomi program ini sangat menunjang kebutuhan masyarakat terlebih masyarakat menengah kebawah, dan juga sangat membantu infrastruktur di lingkungan dimana mereka tinggal baik pembangunan jalan, selokan, lampu jalan dan lain-lain sampai kepada pengadaan kursi yang bisa digunakan untuk kebutuhan kemasyarakatan. Dalam hal politik dengan adanya program ini maka masyarakat menjadi lebih simpatik terhadap pemerintah karena

terbukti dalam membangun serta mensejahterahkan masyarakatnya.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan dan hasil penemuan dalam penelitian, maka dirasa perlu untuk mengemukakan beberapa saran atau rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak Pemerintah dalam hal ini BPMPK, lebih memperhatikan kecepatan proses pencairan dana, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyaluran dana di masing-masing lingkungan, agar proses pelaksanaan program Program PBL Mapaluse bisa dijalankan sesuai prosedur pelaksanaannya.
2. Diharapkan pihak BPMPK menambah tim teknis dan fasilitator di setiap lingkungan agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Diharapkan pihak KMM untuk mengadakan Diklat untuk menambah pengetahuan dalam hal kemampuan teknologi untuk memudahkan dalam pembuatan proposal pengajuan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

4. Diharapkan partisipasi dari masyarakat dari berbagai golongan untuk turun langsung ke lapangan guna menambah swadaya untuk pembangunan. Selain itu diharapkan agar program ini bisa meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan antusias masyarakat dalam hal Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Lingkungan Sosial dan Ekonomi (PBL Mapaluse) di lingkungannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Satori, Djam'am dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sumber Lain :
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011
- Peraturan Walikota Manado No.9 tahun 2011 tentang Penetapan
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015.